

## **Dana Bencana Rp 456 Juta Diduga Ditilep**

**SEMARANG-** Temuan-temuan mengejutkan terkait dugaan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) anggaran APBD Jateng tahun 2014 digunakan bancaan orang-orang yang tidak bertanggungjawab terungkap dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah.

Kali ini berdasarkan temuan BPK bahwa dana BTT Pemprov Jateng se-

 Baca DANA .hal 7

## **Dana Bencana**

**dari hal 1**

nilai Rp 456 juta yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus sebesar Rp 456 juta ternyata tidak diserahkan kepada masyarakat yang berhak menerima sebagaimana pengajuan dalam proposal.

Fakta itu terungkap dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Jateng. LHP Nomor 35B/LHP/BPK/XVIII. SMG/06/2015, tanggal 16 Mei 2015, yang ditandatangani Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Hery Subowo.

Selain itu BPK juga menemukan realisasi BTT tidak dipertanggungjawabkan secara tepat waktu. Sampai dengan tanggal 10 Januari 2015, BTT yang telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 2,3 miliar. Sedang yang

belum dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp 456 juta

Atas penyalahgunaan wewenang tersebut, telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu Kepala Kepolisian Resort Kudus. Dengan nomor surat 300/96/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014.

Menurut BPK RI, penyalahgunaan BTT itu terjadi karena prosedur pemberian BTT tidak dilaksanakan. Sehingga mengakibatkan penyaluran bantuan tidak melalui mekanisme transfer. Sehingga membuka peluang penyalahgunaan BTT.

Kepala Biro Humas Pemprov Jateng Sinoeng N. Rachmadi mengakui adanya dugaan penyelewengan BTT di Kabupaten Kudus sebesar Rp 456 juta. "Hal ini telah ditangani oleh aparat

kepolisian setempat dan Gubernur Jateng meminta agar diusut tuntas. Karena bantuan uang pada waktu itu yang diberikan berupa cek, telah diterima oleh SKPD Kabupaten Kudus (bukti tanda terima ada, *red*) untuk segera disalurkan masyarakat yang terkena bencana," ungkapnya.

Terkait kasus tersebut, Gubernur telah memerintahkan BPBD Jateng untuk mengawal proses penyelesaiannya sampai tuntas. Meskipun dalam kasus ini menjadi tanggungjawab kabupaten penerima bantuan. Dalam hal ini SKPD Kabupaten Kudus.

"Agar tidak terulang di waktu yang akan datang, penyaluran bantuan akan diberikan melalui rekening bank yang ditunjuk," tukasnya. **(udi/muz)**